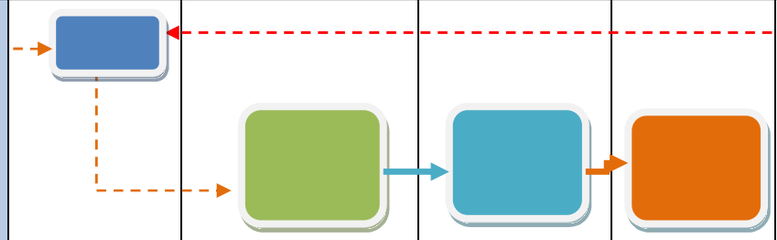
SOP PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	TAHAPAN					MUTU BAKU			KET
		APLIKASI	KABID HAM	KADIV YANKUMHAM	KA.KANWIL	DIREKTUR JENDERAL HAM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	**Tahapan Pembentukan P2HAM** Keseluruhan rangkaian yang harus dilalui oleh unit kerja menuju predikat Unit Kerja P2HAM. Tahanap yang harus dilalui antara lain Pencanangan, Pembentukan, Evaluasi, Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan						-Pencanangan Surat pernyataan, Pembentukan tim operator unit kerja -Pembangunan Pemenuhan criteria dan indikator oleh unit kerja, pendampingan oleh DJHAM melalui bimtek sosialisasi -Evaluasi Berita Acara Evaluasi, Unggah Data Pendukung pada system aplikasi -Penilaian Pembentukan Tim Penilai, Penilaian via Sistem Aplikasi Penilaian P2HAM -Pembinaan dan Pengawasan Dilakukan oleh DJHAM, Laporan pengawasan setiap tahun	Bulan januari s/d Maret 2023 Bulan januari s/d September Bulan April s/d September Bulan Oktober s/d Desember Dilaksanakan sepanjang tahun	1. Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM BIDANG HAK ASASI MANUSIA SUB BIDANG PEMAJUAN HAM	**Nomor SOP**	:	**W22.2918.OT.02.02**
	Tanggal Pembuatan	:	**17 Maret 2023**
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan Oleh	:	**Kepala Kantor Wilayah,** Ditandatangani secara elektronik oleh : **Marciana Dominika Jone, SH** **NIP. 196411261991032001**
	Nama SOP	:	**Pelayanan Publik Berbasis HAM**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara RI 1945 2. Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM	1. Mengerti dan memahami masalah-masalah HAM 2. Pendidikan minimal S1
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. Standar Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT 2. Pelayanan Publik Berbasis HAM(P2HAM)	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

	4. Alat Komunikasi **5. Alat Dokumentasi dan Pengarsipan**
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat pelaksanaan pelayanan	**Disimpan sebagai data elektronik dan manual**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi